

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemberdayaan Peternak

Oleh:

¹ Thomas Kimko; ² Akmal; ³ Fitriani; ⁴ Paul Adryani Moento

^{1,2}. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

^{3,4}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Musamus

Email. kimkotomas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi kebijakan program bantuan pemberdayaan peternak di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Merauke pada kelompok peternak yang menerima program bantuan pemberdayaan peternak dengan jumlah informan sebanyak 16 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi efektifitas, peternak merasa sangat efektif dengan adanya bantuan tersebut, dari sisi efisiensi, sangat dirasakan dan membantu masyarakat peternak, dari sisi kecukupan sangat cukup dalam hal penyaluran bantuan yang diterima, dari sisi pemerataan, pemberian bantuan ternak tersebut sudah sesuai namun bantuan ternak yang diberikan tersebut tidak merata karena Dinas kurang mengontrol ternak-ternak yang diberikan tersebut. Sementara itu, dari sisi responsifitas, memang dinas terkait selalu merespon dengan baik dengan melakukan pendampingan dan kontrol di awal pemberian bantuan ternak akan tetapi seiring berjalanannya waktu hal tersebut sudah tidak berjalan lagi. Dalam ketepatan kebijakan pemberdayaan pemberian bantuan ternak kepada masyarakat oleh Dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Merauke, sejauh ini terlihat baik yaitu pemberian bantuan ternak yang tepat sasarnya dan memberikan dampak yang baik dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat khususnya petani peternak..

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Peternak.

Abstract

This research aims to analyze and evaluate the policy of breeder empowerment assistance programs in Merauke Regency. This study uses a qualitative approach conducted in Merauke Regency in breeder groups that receive breeder empowerment assistance programs with the number of informants as many as 16 people. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The results showed that in terms of effectiveness, farmers felt very effective with the assistance, in terms of efficiency, very felt and helped the community of breeders, in terms of adequacy is very sufficient in terms of the distribution of assistance received, in terms of equalization, the provision of livestock assistance is appropriate but the livestock assistance provided is uneven because the Service does not control the livestock provided. Meanwhile, in terms of responsiveness, the relevant agencies always respond well by providing assistance and control at the beginning of the provision of livestock assistance but over time it is no longer running. In the accuracy of the empowerment policy of providing livestock assistance to the community by the Merauke Regency Animal Husbandry and Animal Health Office, so far it looks good, namely the provision of livestock assistance that is right on target and has a good impact in terms of improving the economy of the community, especially farmers.

Keywords: Evaluation, Policy, Empowerment, Breeders.

PENDAHULUAN

Peternakan merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi dan mengatasi kemiskinan, bahkan aktifitas beternak menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dalam berpikir, bertindak. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Oja Hubertus 2015). Aktifitas beternak sebagai salah satu aktifitas ekonomi yang mengarah kepada upaya mengurangi tingkat kemiskinan dimana kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan perekonomian. Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan (Nurwati 2008).

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan kompleks dan multidimensional yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kenyataannya persoalan kemiskinan belum dapat diatasi sepenuhnya oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Persolan-persoalan tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di masyarakat. Masalah kemiskinan menjadi suatu problem yang besar selama sejarah indonesia sebagai sebuah negara. Selain itu kemiskinan membuat anak-anak di indonesia tidak dapat menerima pendidikan yang berkompeten, sulit membiayai kesehatan, kurang memiliki tabungan serta tidak memiliki investasi, kurangnya akses layanan publik serta kurangnya lapangan kerja dan lain-lain (Prawoto 2009) .

Menurut Goenawan Sumodiningrat yang dikutip oleh Nanih M dan Agus Ahmad S, kalau dilihat dari segi penyebab kesenjangan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi kesenjangan dan kemiskinan natural, kesenjangan dan kemiskinan kultural, dan kesenjangan dan kemiskinan struktural (Hasanuddin 2008). Kesenjangan dan kemiskinan natural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti perbedaan usia, perbedaan kesehatan, perbedaan geografis dan tempat tinggal. Kesenjangan dan kemiskinan kultural adalah kesenangan dan kemiskinan yang dilihat dari adat istiadat dan etika kerja. Selain itu kesenjangan dan kemiskinan struktural adalah kesenangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia seperti distribusi asset yang timpang, kebijakan

ekonomi yang diskriminatif, korupsi dan tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan masyarakat atau golongan tertentu.

Dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Menurut Oakley dan Marsden, dalam proses pemberdayaan terdapat dua kecenderungan (Priyono,O.S., Pranarka 1996) ,yaitu: pertama, kecenderungan primer, artinya proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya, proses ini berupaya membangun kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder artinya proses pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Menurut Sumodiningrat dalam Kurniawati et al (2013) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); (2) menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (empowering); (3) memberikan perlindungan (protecting). pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan (Kurniawati, Supriyono, and Hanafi 2013). Sejalan dengan pandangan diatas maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan pemberdayaan. Menilik pemberdayaan maka pemerintah bisa melakukan berbagai cara melalui kebijakan yang diselaraskan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Proses pemberdayaan ialah sebuah alur yang melibatkan sekelompok masyarakat untuk melakukan sebuah kerja sama dalam organisasi formal maupun tidak formal dalam rangka pengkajian sebuah masalah, merencanakan, melaksanakan, serta meakukan sebuah evaluasi terhadap suatu program yang sudah di rencanakan secara bersama. Dalam proses pemberdayaan dapat di ukur melalui tingkat kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat di awali dari suatu aktifitas kajian atau analisis masalah, kemudian perencanaan program, pelaksanaan program serta keteribatan dalam melakukan evaluasi secara berkeanjutan (Widjajanti 2011).

Hal ini pula yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Merauke dengan melaksanakan salah satunya program pemberdayaan lewat Kebijakan Program Bantuan Pemberdayaan Peternak Di Kabupaten Merauke. Adapun salah satu tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan bibit ternak untuk selanjutnya dikembangbiakan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidupnya. Adapun bantuan ternak yang digulirkan dari program ini yakni bantuan ternak sapi, ternak ayam dan ternak babi dengan menyasar pada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan mengajukan bantuan ternak kepada pemerintah daerah lewat Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Dari hasil observasi ditemukan bahwa sebelum program bantuan ternak diberikan, warga masyarakat yang menekuni usaha peternakan kesulitan dalam mendapatkan bibit ternak, pengembangan usaha ternak yang tentunya ikut mempengaruhi penghasilan peternak terutama peternak yang merupakan orang asli Papua dimana dalam pengembangan usaha ternak mengalami kesulitan modal terkait pengembangan usaha ternak menjadi masalah utama dalam menjalankan usaha ini. Secara statistik berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke pada tahun 2020 jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Merauke mencapai hingga 69.524 ekor. Jumlah ini didominasi oleh sapi potong sebanyak 40.739 ekor sedangkan jumlah ternak babi sebanyak 12.596 ekor. Selain ternak, di Kabupaten Merauke juga terdapat populasi unggas yang mencapai hingga 2.419.354 ekor dengan dominasi oleh ayam kampung sebanyak 1.667.568 ekor (Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke 2021). Ini menunjukkan bahwa bidang peternakan mendapatkan perhatian serius dari para petani ternak sebagai lahan pekerjaan.

Tabel 1.1 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Merauke, 2020

Kecamatan/ Subdistrict	Sapi Potong/ Cow	Kerbau/ Buffalo	Kuda/ Horse	Kambing/ Goat	Babi Pig
Kimaam	85	0	22	62	104
Tabonji	0	0	0	0	13
Waan	24	5	0	0	27
Ilwayab	33	0	0	36	91
Okaba	1.614	0	209	173	176
Tubang	187	0	15	38	109
Ngguti	88	0	0	0	109
Kaptel	106	0	0	52	35
Kurik	5.919	143	326	2.535	270
Animha	1.349	22	31	57	158
Malind	3.685	195	214	1.106	1.054
Merauke	2.905	25	511	594	4.75
Naukenjerai	1.793	6	84	107	257
Semangga	6.099	52	315	2.825	1.417
Tanah Miring	5.974	72	420	2.552	2.138
Jagebob	4.058	52	124	927	751
Sota	948	4	52	50	114
Muting	1.349	24	88	87	484
Elikobel	1.360	0	233	65	359
Ullin	3.163	32	30	111	180
Kabupaten Merauke	40.739	632	2.674	11.375	12.596

Sumber : (BPS, 2021)

Dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang beternak di Kabupaten Merauke, pemerintah telah melakukan berbagai upaya termasuk pemberian bantuan ternak bagi petani ternak. Petani ternak di Kabupaten Merauke banyak yang memilih untuk memelihara sapi sebagai usaha sampingan. Usaha sapi potong yang dikembangkan meliputi usaha pola penggemukan dan pola induk anak dan ada yang memilih untuk beternak ayam petelur dan ayam pedaging serta beternak kambing dan babi. Bantuan tersebut diberikan dari sumber dana APBN dan dana Otonomi Khusus, yaitu program bantuan ternak budidaya sapi potong, ayam dan babi.

Tabel 1.2 Jumlah Penyaluran Program Bantuan Ternak

No	Jenis Bantuan					
	Ayam		Babi		Sapi	
	2016-2017	2018	2016	2017	2015	2016
1	4.500.000 Ekor	1.500.000 Ekor	27 Pasang	29 Pasang	138 Ekor	101 Ekor

Sumber : Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke

Pemberian bantuan ternak digulirkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan jumlah bantuan yang bervariasi yakni: a. Bantuan Ternak Ayam Tahun 2016-2017 : 4.500.000 untuk 9 kelompok Tahun 2018 : 1.500.000 untuk 3 kelompok b. Bantuan Ternak Babi Tahun 2016 : 27 pasang untuk 4 kelompok Tahun 2017 : 27 pasang untuk 5 kelompok c. Bantuan Ternak Sapi Tahun 2015 : 138 ekor untuk 7 kelompok Tahun 2016 : 138 ekor untuk 4 kelompok Pada data tersebut adalah bentuk bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sebelumnya pemerintah telah memberikan bantuan ternak kepada masyarakat, selain bantuan ternak unggas tersebut, ada bantuan ternak lainnya seperti bantuan ternak babi, kambing dan bantuan ternak budidaya sapi potong.

Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok peternak yang ada di Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Jagebob, Distrik Kurik dan Distrik Merauke. Pemberian bantuan ternak tidak hanya ternak budidaya sapi potong dan kambing tetapi ada pula ternak lain, yaitu ternak ayam petelur dan ayam pedaging, yang diberikan kepada perindividu/perorangan. Masing-masing tersebar dibeberapa distrik yang berada di kabupaten Merauke, yaitu di Distrik Merauke sebanyak dua orang, distrik Semangga sebanyak empat orang dan di Distrik Tanah Miring sebanyak dua orang pada tahun anggaran 2016, pada tahun anggaran 2017 hanya diberikan pada dua orang yang masing-masing berada di Distrik Merauke. Dan pada tahun anggaran 2018 pemberian bantuan ternak ayam ptong pada satu orang yang berada di Distrik Merauke dan bantuan ternak babi pada satu orang di Distrik Semangga.

Dari data bantuan diatas dapat dijelaskan bahwa kelompok yang mendapatkan bantuan budidaya ternak tersebut dalam perkembangan ternaknya banyak mengalami kematian yang disebabkan karena penyakit hewan. Selain itu terjadinya kematian pada ternak kelompok-kelompok tersebut disebabkan pula karena kurangnya ketersediaan pakan, ketersediaan pakan juga mengikuti musim. Pada musim penghujan ketersedian pakan melimpah namun pada musim kemarau ketersedian pakan mengurang sehingga ternak-ternak tersebut disaat musim kemarau kurang mengkomsumsi pangan yang baik yang mengakibatkan banyak yang terkena penyakit, sehingga menyebabkan kematian.

Selain itu banyak ternak yang mengalami kematian disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan, kurangnya ketersedian pakan, sehingga mengakibatkan banyak ternak yang terkena penyakit yang pada umumnya sakit gembung perut dan

diare dan mengakibatkan kematian serta kurangnya konsultasi kelompok penerima ternak kepada petugas, disisi lain bantuan ternak tersebut terdapat juga hewan ternak yang lari ke hutan. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan usaha sapi potong, kambing, ayam petelur, ayam pedaging dan babi adalah kurangnya pakan dan ketidaktahuan petani peternak dalam merawat ternaknya serta kurangnya perhatian pemerintah dalam hal sosialisasi dan membimbing petani ternak dalam menjalankan usaha ternaknya sehingga pada proses berjalan peternakan baik kelompok maupun individu banyak yang mengalami kematian dan yang lainnya hilang (lari kehutan). Padahal dalam Peraturan Bupati Merauke No 52 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada pasal 12, dalam bidang Penyuluhan dan Pembinaan Usaha Peternakan, dari uraian tugas huruf j yaitu, melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok peternakan sehingga perlu adanya pendampingan bagi kelompok atau individu dalam mengelolah peternakannya. Kebijakan yang baik tentu kebijakan yang berproses dengan berpatokan pada tiga aspek kebijakan yakni pada tataran perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga pada tataran penilaian atau evaluasi kebijakan (Peraturan Bupati Merauke No 52 Tahun 2019 n.d.). Dimana evaluasi kebijakan mempunyai tujuan memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan, apakah sudah maksimal dilaksanakan ataukah perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi kebijakan program bantuan pemberdayaan peternak di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Merauke bertempat pada Kantor Kantor Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Merauke. Guna mendapat penjelasan serta gambaran detail terkait peran Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemberdayaan Peternak Di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara memberi informasi aktual terkait dengan kondisi hal yang akan diteliti oleh individu. Selanjutnya, penelitian kualitatif memerlukan data yang sifatnya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini prosesnya dengan melakukan wawancara yang berfokus pada data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, pengumpulan data juga melalui studi pustaka dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesui dengan referensi yang berkaitan dengan isi penelitian . Dapat berupa kumpulan buku, regulasi perundangan, jurnal-jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Adapun proses dalam menganalisa data penelitian melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Lexy 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas

Dalam pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat peternak usaha dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diharapkan dapat (a) memotivasi keluarga peternak agar mampu meningkatkan pendapatannya; (b) meningkatkan interaksi dan kerjasama baik individu atau dalam kelompok; (c) mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal; (d) memperkuat budaya kewirausahaan; dan (e) mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. (Dunn 2003) menyebut bahwa evaluasi menekankan pada terciptanya premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi tentang kinerja dari tersebut yang dijalankan tersebut. Menurut Kartasasmita (2001) dalam rosidi tahun 2019, efektifitas merupakan konsep pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya dengan beberapa jumlah yang banyak ditetapkan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam sebuah kegiatan yang di laksanakan oleh sesorang atau perusahaan, selanjutnya, Menurut Dunn (Ramdhani and Ramdhani 2017), Efektifitas merupakan suatu pencapaian hasil yang telah di tetapkan, atau merupakan cara mencapai tujuan dari sebuah tindakan, yang memiliki hubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu di terukur dari sebuah produk atau program. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua kelompok pemohon mendapatkan bantuan ternak disebabkan karena beberapa faktor yaitu: a. Keterbatasan anggaran untuk program tersebut;, b. Banyaknya jumlah kelompok pengusul bantuan; c. Keterbatasan bibit ternak bantuan; d. Hasil seleksi administrasi terhadap pemohon terutama melihat pada target dari kelompok pengusul. Pandangan (Dunn 2003) menyebut bahwa hasil evaluasi setidaknya memberikan informasi yang valid terkait dengan performan kebijakan dari sisi kebutuhan, value dan kesempatan yang dicapai oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian melihat pada keterbatasan tersebut diharapkan kedepan akan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam rangka menyusun dan mengalokasikan anggaran pendukung yang dapat menampung setidaknya usulan yang dibagikan secara merata kepada setiap kelompok dengan memperhatikan kondisi wilayah dalam artian bantuan ternak yang dibagikan diharapkan menyangsar di setiap kampung dan distrik yang ada agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya program bantuan ternak ini diharapkan ternak yang diberikan dapat mengurangi populasi penduduk yang padat ke daerah yang populasinya sedikit, ditingkatkan jumlahnya ketika dikelolah oleh peternak tersebut dan peningkatan ekonomi dan kesejateraan.

Efisiensi

Dalam pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat peternak, pada tingkat efisiensinya sangat tergantung dari sejauh mana pemberian ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalankan program tersebut. Dari sisi efisiensi, sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, atau hasil dari peternak sangat efisien. Menurut hasil penelitian (Yogasmara 2016) bahwa pengembangan agribisnis peternakan mempunyai tujuan, antara lain meningkatkan pendapatan dan taraf hidup peternak beserta keluarganya.

Dari data hasil penelitian terlihat pula ada kelompok yang telah berhasil mengelola bantuan ternak dimana output dari bantuan tersebut adalah dalam bentuk dijual, akan tetapi ada kelompok juga yang belum berhasil mendatangkan produksi terhadap bantuan tersebut hal ini disebabkan karena beberapa antara hewan ternak yang mati dan minimnya pemahaman terhadap produksi hewan ternak yang dapat menghasilkan keuntungan sebagai akibatnya tidak semua kelompok berhasil dalam proses produksi untuk dijual. Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke ini sangat membantu para peternak dalam meningkatkan perekonomian mereka, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para peternak lainnya, seperti peternak sapi potong, khususnya peternak lokal dalam mengelola belum sepenuhnya mengetahui pengelolaan sapi potong tersebut, kendala yang lain yaitu kurangnya tempat atau kandang sebagai penampung ternak mereka, sehingga hal ini menyebabkan perkembangan ternak-ternak yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak banyak mendapat keuntungan bagi petani peternak hewan bantuan tersebut, karena hewan-hewan tersebut banyak yang mengalami kematian yang disebabkan kurangnya pasokan makan bagi ternak tersebut.

Dari data hasil penelitian bantuan ternak yang mati disebabkan karena beberapa faktor antara lain: 1. Faktor kurangnya ketersediaan pakan. 2. Faktor kesehatan hewan yang terkena penyakit. 3. Faktor lain yang disebabkan karena kurangnya pemahaman peternak terhadap cara beternak yang baik. Dengan faktor penyebab diatas maka dinas terkait dalam hal ini pendamping yang ditugaskan harus benar-benar memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat peternak tentang cara beternak agar dapat meminimalisir angka kematian hewan ternak. Masalah yang lainnya yaitu karena hewan-hewan tersebut juga kurang dikontrol oleh pemiliknya, sehingga hewan-hewan tersebut lari dan hilang, banyak hewan yang berkeliaran dan tinggal di hutan. Dengan sejumlah masalah diatas maka dinas terkait perlu melakukan pendampingan kepada para petani peternak terutama yang mendapatkan bantuan agar usahanya dapat berjalan baik dan disatu sisi bantuan hewan ternak yang diprogramkan tidak menjadi sia sia.

Kecukupan

Kriteria kecukupan menekan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. kecukupan adalah kepadaan, kelengkapan, kebulatan, kepadanan, keseluruhan, kesemestaan, keutuhan, totalitas. Kesimpulan sinonim kecukupan adalah kepadaan, kelengkapan. Dunn (2003) mengatakan bahwa jika kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang mempunyai makna maka masalah kebijakan tersebut telah dibuat menjadi jelas atau berhasil. Selain itu, menurut Muhammad Firyal Akbar Kecukupan berkaitan dengan seberapa signifikan suatu proses efektifitas memberikan hasil yang diharapkan tentang nilai dan kesempatan yang memberikan sebuah masalah, kecukupan memberikan pada eratnya suatu hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang di dapatkan (Muhammad Firyal Akbar 2016).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa bantuan ternak oleh Dinas Peternak dari segi kecukupan, dilapangan terlihat jelas sangat cukup bagi para peternak. Para peternak merasa bantuan tersebut sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi peternak. Kecukupan bantuan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke ini sangat cukup dan yang terpenting adalah dapat membantu para peternak dalam meningkatkan ekonomi mereka. Selain peternak babi yang merasakan manfaat yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, ada juga manfaat yang dirasakan oleh peternak sapi potong, sebab sebelum adanya bantuan ternak sapi potong para peternak harus mengeluarkan uang sekitar 2 juta sampai 5 juta untuk membeli bibit atau anakan sapi potong tersebut, ada juga untuk mendapatkan bibit sapi, para peternak mengawinkan sapi jantan dengan sapi betina milik peternak lain.

Mencermati alokasi anggaran yang terbatas untuk menyalurkan program bantuan ternak ini maka dapat dikatakan dinas terkait telah berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang ada guna membantu petani ternak. Dinas terkait juga melakukan cara lain yang dianggap efektif untuk membantu petani ternak yang tidak diberikan bantuan dengan cara melakukan bantuan bergulir terutama dalam ternak babi, dimana peternak yang mendapatkan bantuan diwajibkan untuk memberikan 1 pasang anakan babi yang baru lahir kepada peternak lain sehingga mereka dapat menjalankan usahanya. Program bantuan bergulir ini menjadi win-win solution yang baik dan adil, baik dari sisi pemerintah sendiri yang mengalami keterbatasan anggaran maupun dari sisi petani ternak yang dinilai berhasil dalam mengembangkan usahanya.

Kurangnya pasokan makanan menjadi masalah yang dihadapi oleh peternakan, apalagi pada saat ini Kabupaten Merauke memasuki musim kemarau yang panjang, sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjanga, yang mengakibatkan lahan-lahan rumput mati, hal ini mengakibatkan banyak hewan ternak yang tidak dapat mengkonsumsi makanan dengan baik, ditambah lagi dengan tidak ditanamnya padi yang berdampak pada tingkat produksi panen. Hal ini juga berdampak pada

ketersediaan makanan bagi hewan ternak yang mengkonsumsi makanan dari sisa penggilingan gaba padi tersebut. Tidak terpenuhinya semua kebutuhan yang dibutuhkan akan mengakibatkan tidak efektif dan efisien dari hasil kebijakan program bantuan pemberdayaan masyarakat peternak di kabupaten Merauke tersebut. Sehingga perlu adanya penanganan dan tinjauan atau evaluasi terkait bantuan ternak dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan.

Perataan

Perataan dalam sebuah kebijakan publik memiliki artidengan sebuah keseimbangan yang diberikan dan di peroleh sasaran kebijakan publik. Menurut William Dunn bahwa kriteria kesamaan sangat berkaitan dengan sebuah rasionalitas yang legal dan sosial serta tertuju pada distribusi akibat dan sebuah usaha antara sekelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu kebijakan yang berorientasi pada sebuah perataan merupakan kebijakan yang memiliki akibat atau sebuah usaha secara merata, adil dalam proses pelaksanaan (Putera and Santoso 2016).

Hasil dilapangan menunjukan bahwa Dinas terkait benar-benar mengupayakan agar bantuan ternak tersebut dibagikan itu sesuai dengan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, artinya dinas terkait telah benar-benar menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan tersebut sebagaimana disebut oleh Dunn (2003) bahwa ketika kebijakan mempunya nilai maka hasil tersebut telah memberikan sumbanghan pada tercapainya tujuan dan sasaran. Hal ini juga diperkuat oleh peternak yang mendapatkan bantuan ternak tersebut, menurutnya bahwa soal pemerataan bantuan yang diberikan iti sudah sesuai dengan apa yang di usulkan. Dinas memberikan bantuan ternak yang dikasih sesuai dengan apa yang ditandatangi atau diatas kertas sesuai dengan pelaksanaannya, hal ini tentu untuk menghindari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah.

Jadi memang benar program bantuan ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sudah sesuai dengan yang didata. Hal ini mendapat sanjungan dari para peternak, sebab mereka melihat bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sangat konsisten dengan apa yang diprogramkan. Para petani sangat antusias dengan bantuan ternak yang diberikan, pemerataan ini juga diungkapkan oleh peternak sapi dan babi yang mengungkapkan bahwa bantuan ternak yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke ini dari sisi pemerataan, semuanya diberikan berdasarkan kebutuhan dari para petani tersebut. Mereka mengakui baik setiap individu maupun kelompok yang diberikan itu sesuai dengan data dari para peternak yang terdaftar.

Dalam memberikan bantuan kepada para peternak yang ada di Kabupaten Merauke oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, sebenarnya tidak semua mendapatkannya atau tidak merata, karena mengingat keterbatasan keuangan, sehingga diupayakan atau diberikan kepada kelompok dan individu yang ada di beberapa distrik dan kampung saja dan bagi para peternak yang

benar-benar mau mengembangkan peternakannya, yaitu ada yang mendapat bantuan ternak 20 ekor, ada yang 23 ekor dan ada yang 25 ekor, namun semua bantuan ternak tersebut yang diberikan diatas 20 ekor.

Ada juga bantuan ternak yang diberikan tersebut tidak semua kampung yang ada di distrik tersebut, bantuan tersebut hanya diberikan pada kelompok-kelompok ternak yang benar-benar ulet menjalankan usaha ternaknya. Disisi lain bahwa dalam bantuan tersebut dalam hal ini Dinas terkait tidak sepenuhnya mengontrol ternak-ternak yang diberikan tersebut, sehingga para petani ternak tersebut banyak yang mengalami kesulitan dalam mengelolah ternaknya. Dunn (2003) mengatakan evaluasi memberikan sumbangsihnya terhadap klarifikasi dan kritik akan nilai-nilai yang menjadi dasar terhadap target dan tujuan sehingga dengan demikian masukan terhadap pentingnya kontrol bagi para peternak yang menerima bantuan perlu dilakukan dan ditindaklanjuti agar program tersebut tidak menjadi sia-sia atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Responsifitas

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Resposif terhadap suatu kebijakan adalah suatu upaya yang baik mengingat bahwa dalam evaluasi kebijakan lebih berkaitan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi tindakan yaitu lebih pada proses perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya telah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati dimana evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Selain itu menurut Luki nakita Responsifitas memiliki pemahaman sebagai sebuah respon dalam suatu kegiatan yang di ditanggapi sebagai sasaran kebijakan publik maupun penerapan kebijakan. Responsifitas erat kaitannya dengan sebuah langkah kebijakan yang dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, prefensi maupun nilai sekelompok masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat melalui tanggap cepat masyarakat mengenai proses pelaksanaan program, pelaksanaan program tersebut di awali dengan proses memprediksi pengaruh yang akan terjadi setelah kebijakan di laksanakan, serta ada tanggapan masyarakat setelah ada dampak kebijakan tersebut melalui dukungan dan penolakan (Natika and Putri 2021).

Dalam pemberian bantuan ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke yang melihat tentang responsifitas sejauh ini baik dalam menyikapi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun respon cepat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terlihat hanya pada awal ternak diberikan, banyak keluhan yang disampaikan oleh peternak yang merasa bahwa Dinas terkait selama ini sudah tidak melakukan kontrol terhadap ternak-ternak yang diberikan pada peternak. Beberapa permasalahan yang ditemui diklasifikasikan

sebagai berikut: 1. Kurangnya pendampingan secara intens dari pendamping; 2. Kurangnya perlindungan terhadap kawanan ternak dalam bentuk pagar atau kandang yang memadai; 3. Kurangnya kreatifitas peternak dalam manajemen resiko jika terjadi sesuatu terhadap ternak peliharaannya.

Selain kurangnya pendampingan mengakibatkan para peternak banyak yang kehilangan ternaknya, hal lain adalah karena kurangnya pengetahuan mereka tentang mengurus ternak-ternak tersebut. Dari data yang disajikan dalam hasil penelitian terlihat bahwa jumlah pendamping pada setiap kelompok peternak sangat cukup dalam artinya satu kelompok peternak didampingi oleh satu orang tenaga pendamping yang bertugas memberikan edukasi kepada peternak, akan tetapi pendamping terhadap peternak tidak dilakukan secara kontinu dimana pendamping hanya melakukan pendampingan kepada kelompok peternak diawal pemberikan bantuan ternak setelah itu kelompok peternak kurang diawasi sehingga dari hasil data penelitian terlihat bahwa ada ternak yang mati terutama ternak sapi. Kurangnya pendampingan juga akan menyebabkan tidak berjalannya pemberdayaan kepada petani ternak, sehingga hal ini perlu menjadi catatan dan pertimbangan dari dinas terkait.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Dalam kaitannya dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat petani ternak di kabupaten Merauke oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Merauke memang perlu tindakan responsif yang cepat dana akurat terkait dengan ternak-ternak yang diberikan, masalah yang dihadapi oleh peternak berupa pangan ternak, kurangnya pemahaman oleh petani ternak terkait pengurusan ternaknya adalah bagian yang harus mendapat respon dari dinas terkait secara cepat dan tanggap agar dapat dilakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Ketepatan

Dalam hal ketepatan kebijakan pemberdayaan pemberian bantuan ternak pada masyarakat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, sejauh ini terlihat baik yaitu programnya dengan pemberian ternak yang tepat pada sasarannya, namun dalam perjalannya kurang perhatian yang diberikan oleh dinas terkait dalam hal ini mengontrol kebijakan tersebut, sehingga banyak ternak yang sudah di berikan oleh dinas terkait sebagiannya tidak menghasilkan ouput bagi masyarakat.

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Dunn, 2003). Ketepatan merupakan sebuah rasionalisasi kebijakan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat penting oleh publik. Menurut Dunn dalam Siti Asyiah sebuah ketepatan adalah suatu kriteria yang digunakan dalam

memilah sejumlah pilihan program untuk di pakai sebagai rekomendasi dengan memberikan nilai apakah hasil dan pilihan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak dan tepat. Menurut Adinda Nurul Hikmah dalam Siti Asyiah ketepatan juga merupakan sebuah implementasi kebijakan yang menghasilkan solusi atau masalah yang dihadapi masyarakat (Asyiah, Adnan, and Mubarak 2018).

Dari sini jelas bahwa kriteria melihat pada tujuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke dalam memberikan bantuan ternak sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat peternak. Dari hasil wawancara dan berdasarkan data sekunder terlihat bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh peternak baik peternak babi, sapi maupun ayam dilihat dari sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program bantuan peternak telah menjawab salah satu tujuannya yakni mensejaterahkan masyarakat petani ternak dari sisi peningkatan ekonominya.

Dunn (2003) menyebut bahwa evaluasi kebijakan berkaitan dengan informasi akan nilai dan manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan. Dalam hal ketepatan kebijakan pemberdayaan pemberian bantuan ternak pada masyarakat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Merauke sejauh ini terlihat baik yaitu programnya dengan pemberian ternak yang tepat pada sasarnya, sehingga program tersebut banyak memberikan dampak positif bagi para peternak yang merasa ada perubahan pendapatan mereka. Mereka mengaku bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke ini sesuai dengan kebutuhan mereka dan bantuan ini juga sudah sesuai dengan data yang dipegang oleh Dinas terkait. Dari berbagai hal diatas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga peramalan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul. Sebuah implementasi agar efektif memerlukan berbagai ketepatan, Nugroho merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hak keefektifan kebijakan antara lain : (a) ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, (b) ketepatan pelaksanaan, dalam hal pelaksana atau aktor dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan. Ketepatan target berkaitan dengan tiga hal yaitu pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua kesiapan kondisi target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya, ketepatan lingkungan terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus

kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait serta lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik atas kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan (Nugroho 2008).

Dari data hasil penelitian dilapangan sejumlah petani ternak mendapatkan manfaat yang signifikan dengan adanya bantuan ternak ini, dimana secara keuntungan finansial terdapat sejumlah peningkatan ekonomi kelompok peternak baik peternak babi, sapi maupun ayam dari data hasil penelitian menunjukkan adanya pendapatan yang meningkat dibanding sebelum mendapatkan bantuan ternak. Hal ini berarti pemerintah telah mencapai salah tujuannya yakni peningkatan ekonomi kelompok sasaran kebijakan yang ditunjukan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa program ini berhasil namun perlu memperhatikan sejumlah hal yang terjadi dalam perjalanan usaha kelompok ternak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan evaluasi bantuan ternak dapat disimpulkan bahwa pembagian bantuan ternak telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, dimana setiap kelompok yang mengajukan bantuan mendapatkan bantuan ternak antara lain ternak sapi, ternak babi dan ternak ayam. Bantuan tersebut menghasilkan perubahan yang baik bagi para peternak dimana menghasilkan pendapatan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun terdapat kendala dalam program bantuan ternak ini yakni bantuan ternak yang diberikan tersebut tidak merata dari jumlah yang diinginkan antara satu kelompok dengan kelompok lain, maupun individu satu dengan individu lainnya dimana dinas kurang mengontrol dan kurangnya pendampingan mengakibatkan para peternak banyak yang kehilangan ternaknya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang mengurus ternak-ternak tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan ditemukan hasil yang masih dipandang belum maksimal pada indikator perataan, sedangkan untuk indikator lain dipandang sudah cukup maksimal. Permasalahan yang menjadi input evaluasi kebijakan bantuan peternak ini telah dijawab dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan, namun ternyata ditemukan bahwa indikator ke empat yakni perataan belum maksimal. Hal yang paling cocok untuk pendukung keberhasilan kebijakan program ini adalah pendampingan yang berkelanjutan dari pihak pemerintah terhadap penerima bantuan serta perlunya alokasi anggaran yang maksimal untuk dapat membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ternak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, Siti, M. Fachri Adnan, and Adil Mubarak. 2018. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2(1): 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. 2021.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasanuddin, Muhammad. 2008. "Evaluasi Program Kampung Ternak Dompet Dhuafa Dalam Mengembangkan Potensi Ternak Lokal Di Desa Lebak Sari Sukabumi Jawa Barat." <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/8392>.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi, Bambang Supriyono, and Imam Hanafi. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi." *Jurnal Administrasi Publik* 1(4): 9–14.
- Lexy, J Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Firyal Akbar. 2016. "Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional." *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* 2(1): 47–64.
- Natika, L, and G N Putri. 2021. "Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum Dan Barang Di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang." *The World of Public Administration ...* 3(1): 26–38. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/1077>.
- Nugroho, D. Riant. 2008. "Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Alex Media Komputindo."
- Nurwati, Nunung. 2008. "Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan." *Jurnal Kependidikan Padjadjaran* 10(1): 1–11.
- Oja Hubertus, Hesty Tambajong. 2015. "Strategi Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Marga Mulia Distrik Semangga." *Societas Unmus* 4(2): 114–31.
- Peraturan Bupati Merauke No 52 Tahun 2019.
- Prawoto, Nano. 2009. "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9(April): 56–68.
- Prijono,O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Putera, D P, and R S Santoso. 2016. "Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 5(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12493>.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 11(01): 1–12.
- Widjajanti, Kesi. 2011. "Jurnal Ekonomi Pembangunan Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(1): 15–27.
- Yogasmara, Dyaz. 2016. "Studi Evaluasi Tentang Dampak Intensitas Pengembangan Agribisnis Peternakan Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 4.

